

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2021, Februari 5). *Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 persen (c-to-c)*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>
- Baskoro, M. A. (2017). Tinjauan atas Perluasan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Lain. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016, September 22). *Sekilas tentang DJP*. Retrieved from tentang DJP: <https://edukasi.pajak.go.id/tentang-pajak/siapakah-djp.html>
- Husyaini, A. A. (2021). Tinjauan Tingkat Kepatuhan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 di KPP Madya Palembang Pada Tahun 2020. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Ivanka, B. T. (2021). Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 di KPP Pratama Medan Petisah. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Kementerian Keuangan. (2020). *APBN 2020*. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-141/PJ/2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, dan Kantor Wilayah Direktur Jenderal Daerah Istimewa Yogyakarta. (2007).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. (2019).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. (2015).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. (2020).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. (2008).
- Samosir, E. P. (2020). Analisis atas Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Sewa Alat Berat di Wilayah Kerja KPP Pratama Balige. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Situmorang, J. J. (2020). Tinjauan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak. (2001).
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/2010 tentang Pengertian Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, dan Jasa Konsultan Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. (2010).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. (2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021).